



DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMONGAN



RENSTRA 2021-2026



JL.SOEMARGO NO.2 LAMONGAN

Our Website and Social Media :

- www.lamongankab.go.id/perikanan
- @diskanlmg



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 telah dapat diselesaikan secara baik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021- 2026.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Lamongan yakni dari tahun 2021 hingga 2026, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis menyajikan rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan setiap tahunnya yang disertai pagu indikatif yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan. Dalam Renstra Dinas Perikanan juga disajikan target capaian indikator daerah berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mencakup target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lamongan pada akhir periode RPJMD.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Lamongan, 27 September 2021

PI. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMONGAN



YULL WAHYUONO, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196607271989031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1.1 Kedudukan.....	9
2.1.2 Tugas.....	9
2.1.3 Fungsi.....	9
2.1.4 Struktur Organisasi.....	9
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	17
2.2.1 Data Personil.....	17
2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana.....	19
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	23
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH....	30
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI LAMONGAN.....	31
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI.....	37
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG PADA RPJMD.....	40
3.5 TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD.....	42
3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	45
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	45
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VIII PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data Kepegawain Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Dinas Perikanan Lamongan.....	18
Tabel II.2	Data Kepegawaian Berdasarkan Status Kepegawaian Dinas Perikanan Lamongan.....	18
Tabel II.3	Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Perikanan Lamongan.....	19
Tabel II.4	Daftar Asset, Jenis, dan Jumlah Dinas Perikanan Lamongan.....	19
Tabel II.5	Daftar Asset, Jenis, dan Jumlah Sarana Gedung dan bangunan Dinas Perikanan Lamongan.....	22
Tabel II.6	Daftar Asset, jenis, dan Jumlah Kendaraan Bermotor Dinas Perikanan.....	23
Tabel II.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	25
Tabel II.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Lamongan.....	27
Tabel II.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Lamongan.....	27
Tabel III.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Lamongan.....	30
Tabel III.2	Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati.....	34
Tabel III.3	Telaah Renstra Kementerian/Lembaga.....	37
Tabel III.4	Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.....	39
Tabel III.5	Telaah RT/RW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039.....	41
Tabel III.6	Telaah KLHS Pada RPJMD.....	43
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	49
Tabel IV.2	Penyelarsan Tujuan dan Sasaran, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data dan Target.....	51
Tabel V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	55
Tabel V.2	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD Dinas Perikanan.....	58
Tabel VI.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan.....	61
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	68

A group of people, mostly men in blue uniforms and caps, are engaged in a tree-planting activity in an open field. They are kneeling or sitting on the ground, working with young saplings. The background shows more people and a building, suggesting an organized community or official event.

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Cascading Misi I Pada RPJMD Tahun 2021-2026.....	46 .
Gambar IV.2	Cascading Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026.....	47
Gambar IV.3	Keselarasn Sasaran Program dan Kegiatan Pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026	48



BAB I
PENDAHULUAN
RENSTRA DINAS
PERIKANAN
2021-2026

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Kekayaan bahari di Indonesia merupakan sumber dari segala keindahan yang menawan untuk dilestarikan. Dari keindahan ini selain dari flora dan fauna yang beragama di laut namun juga dari keindahan luas daerah maritim di Indonesia. Indonesia memiliki luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut territorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km² dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²). Hal ini seharusnya mampu dijadikan sebagai penggerak perekonomian, sehingga menjadikan nusantara berada pada posisi berdaya saing dalam perdagangan ekonomi, geopolitik dan pertahanan keamanan.

Sebagai salah satu Kabupaten dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Jawa Timur, Kabupaten Lamongan merupakan Kabupaten yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan panjang pantai mencapai 47 Km dengan jumlah armada perikanan tangkap mencapai 3.423 Unit serta didukung dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 5 Unit. Selain potensi perikanan tangkap sektor laut, Kabupaten Lamongan juga didukung oleh potensi perikanan umum daratan (PUD) yang terdiri dari sungai seluas 1.007,50 HA, waduk seluas 2.388 Ha, dan rawa seluas 1.462 Ha, adapun produksi perikanan tangkap mencapai 79.819,32 Ton. Disamping potensi perikanan tangkap di atas, Kabupaten Lamongan juga dikenal akan potensi perikanan budidayanya yang sangat besar, dimana potensi perikanan budidaya diusahakan dengan luasan lahan budidaya tambak seluas 932,29 Ha, sawah tambak seluas 19.503,54.Ha, Karamba seluas 0,20 Ha, Kolam seluas 51,70 Ha dengan jumlah pembudidaya sebanyak 27.790 orang dengan potensi hasil produksi budidaya pada tahun 2020 mencapai 59.728,16.Ton. Sedangkan untuk jumlah ikan yang diolah hasil produksi perikanan di Kabupaten Lamongan mencapai 89.179,36 Ton.

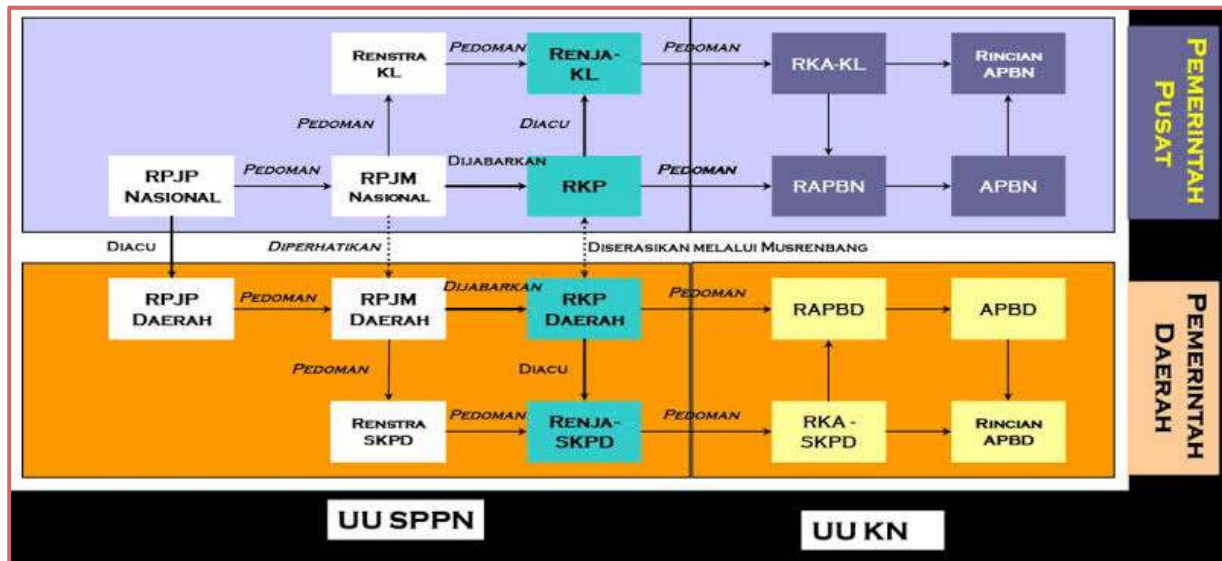
Upaya untuk mengoptimalkan sumber daya kelautan dan perikanan perlu direncanakan dengan baik agar dapat tetap menjaga keberlangsungan sumber daya alamnya. Hal ini dilakukan dengan menyusun dokumen perencanaan yang disebut Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dengan demikian selanjutnya, kedudukan Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun. Renstra mempunyai arti penting bagi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 sebagai pedoman pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lamongan selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra

memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2021 - 2026 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun Keterkaitan Renstra ini dengan RPJMD dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan dalam rangka mengoptimalkan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh RPJMD Kepala Daerah dalam sektor perikanan dan kelautan. Peran dan fungsi RPJMD sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjadi acuan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahunan bagi seluruh stakeholder termasuk swasta dan masyarakat. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan terkait dengan pencapaian misi pertama dari RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu "Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah. Indikator tujuan RPJMD dari misi pertama ini, yang terkait secara langsung kepada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan adalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan peran Dinas Perikanan dalam mewujudkan sasaran di dalam RPJMD Kabupaten Lamongan terdapat pada 2 sasaran RPJMD yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelaku ekonomi dengan indikator sasaran Nilai Tukar Petani (NTP)
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dengan indikator sasaran Prosentase Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Selain keterkaitan antara Renstra Dinas Perikanan dengan RPJMD Kabupaten Lamongan, Renstra Dinas Perikanan itu juga mengacu pada arah kebijakan Nasional pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan juga mengacu kepada kebijakan yang tercantum dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Renstra Dinas Perikanan juga menjadi pedoman penyusunan Renja tahunan Dinas Perikanan. Dengan demikian diharapkan terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan pelaksanaannya sebagaimana terdapat dalam gambar tabel di bawah ini :



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005- 2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D)
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Seri D)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan tahun 2005- 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3)

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
26. Peraturan Bupati Lamongan No. 74 Tahun 2020 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan;
27. Peraturan Bupati Lamongan No.52 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan urusan sektor perikanan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan, stakeholders terkait dalam menentukan prioritas program lima tahunan baik pelaksanaan pembangunan urusan perikanan antar wilayah, antar sector serta lembaga pemerintahan baik pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten. Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan;
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan sebagai institusi pelaksana kebijakan dan pembangunan sektor perikanan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab, sebagai berikut:

○ **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang gambaran umum serta latar belakang penyusunan Renstra yang terdiri dari 4 sub bagian yaitu :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.1 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

○ **Bab II Gambaran Pelayanan DPD**

Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum DPD selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi :

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

○ **Bab III Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Bab ini menyajikan permasalahan pembangunan sesuai sektor dan isu strategis yang memperhatikan :

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi
- 4.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

○ **Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi penyajian, pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah

○ **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan a r a h kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang

○ **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Pada bab ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

- **Bab VII Kinerja Pelayanan Bidang Urusan**

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

- **Bab VIII Penutup**

Bab ini menguraikan tentang kaidah-kaidah pelaksanaan renstra.



BAB II
Gambaran Pelayanan Perangkat
Daerah
RENSTRA DINAS
PERIKANAN
2021-2026

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN OPD****2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD**

Dalam rangka tugas desentralisasi bidang perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan memiliki peran yang penting dalam menentukan kebijakan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Lamongan. Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, maka tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Kedudukan

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Memiliki Kedudukan Sebagai Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perikanan

2.1.2 Tugas

Merumuskan Kebijakan Teknis dan Startegis, Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Pembinaan dan Pelaksanaan Bidang Perikanan

2.1.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan memiliki fungsi sebagai :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang Perikanan;
2. Pengendalian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan;
3. Pengoordinasian pembinaan, penyuluhan dan bimbingan usaha perikanan dari hulu sampai hilir;
4. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dalam batas kewenangan Daerah;
5. Pengawasan pengendalian sumberdaya perikanan dalam batas kewenangan Daerah;
6. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan sebagaimana Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2020 terdiri dari sebagai berikut :

1. Kepala Dinas memiliki tugas tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan bidang perikanan;
2. Sekretaris memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas yang dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang produksi, sarana dan prasarana budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan yang dibantu oleh :
 - a. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya Perikanan dengan Tugas :
 - Melaksanakan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) bidang pembudidayaan ikan dan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK);
 - Memberikan pelayanan penerbitan IUP bidang pembudidayaan ikan dan TDPIK;
 - Menyediakan data dan informasi pembudidayaan ikan;
 - Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaan ikan kecil;
 - Melaksanakan fasilitasi pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha;
 - Memberikan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan dengan Tugas :
- Melaksanakan penyediaan sarana pembudidayaan ikan;
 - Melaksanakan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan;
 - Melaksanakan pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan darat;
 - Melaksanakan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
 - Menyediakan data serta informasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
memberikan fasilitasi pendampingan dan kemudahan akses bantuan sarana budidaya ikan;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan dengan Tugas :
- Melaksanakan pengelolaan dan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - Melaksanakan perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
 - Melaksanakan pembinaan serta pemantauan peredaran penggunaan obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi pada usaha budidaya perikanan;
 - Melaksanakan pembinaan dan pemantauan residu pada hasil perikanan budidaya;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang eksploitasi dan teknologi, prasarana penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan yang dibantu oleh :
- a. Seksi pemberdayaan nelayan kecil dengan tugas :
- Melaksanakan pengembangan kapasitas nelayan kecil;

- Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
 - Melaksanakan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah;
 - Melaksanakan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;
 - Melaksanakan pelayanan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- b. Seksi Penangkapan Ikan dengan tugas :
- Melaksanakan fasilitasi penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah;
 - Melaksanakan penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan;
 - Melaksanakan penyediaan sarana penangkapan ikan;
 - Melaksanakan penerapan dan penyebaran teknologi tepat guna kepada nelayan kecil;
 - Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengembangan;
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - Mempersiapkan prosedur kegiatan pengelolaan penangkapan ikan.
- c. Seksi sarana prasarana perikanan tangkap dengan tugas :
- Melaksanakan perencanaan dan kebijakan di bidang sarana prasarana perikanan tangkap;
 - Melaksanakan pendataan sarana prasarana perikanan tangkap;
 - Melaksanakan penyediaan sarana prasarana perikanan tangkap;
 - Melaksanakan bimbingan teknis di bidang pengelolaan TPI;
 - Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang sarana prasarana perikanan tangkap.
5. Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi,

pembinaan, pengendalian, dan memberikan merencanakan, menyelenggara, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang, pemberdayaan masyarakat pesisir, pengawasan tangkap dan pengawasan perikanan budidaya yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kelestarian sumberdaya perikanan yang dibantu oleh :

a. Seksi pemberdayaan masyarakat dengan tugas :

- Merencanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis operasional pemberdayaan masyarakat pesisir;
- Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan, pengembangan pengelolaan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- Menyiapkan bahan fasilitasi kelompok masyarakat pesisir yang tergabung dalam kelompok usaha garam rakyat, data produksi garam dan harga garam;
- Menyiapkan data, informasi statistik dan bahan pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat pesisir yang tergabung dalam kelompok usaha garam rakyat, data produksi garam dan harga garam;
- Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan teknis lembaga yang bergerak dalam usaha pergaraman;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir.

b. Seksi pengawasan perikanan tangkap dengan tugas :

- Merencanakan kegiatan pengawasan perikanan tangkap, konservasi dan rehabilitasi di wilayah pesisir, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan tangkap, konservasi dan rehabilitasi di wilayah pesisir, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
- Melaksanakan kegiatan pengawasan perikanan tangkap, konservasi dan rehabilitasi di wilayah pesisir, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;

- Menyiapkan bahan fasilitasi kelompok masyarakat pengawas dan pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan tangkap, konservasi dan rehabilitasi;
 - Menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi kelompok masyarakat pengawas, pelanggaran perikanan dan kawasan mangrove;
 - Melaksanakan pemantauan, dan pengawasan terhadap hasil tangkap ikan;
 - Melaksanakan monitoring dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah pesisir, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah pesisir, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
- c. Seksi Pengawasan Perikanan Budidaya dengan tugas :
- Merencanakan kegiatan pengawasan perikanan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
 - menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan budidaya;
 - menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi usaha perikanan budidaya yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan mengganggu kelangsungan hidup usaha perikanan budidaya;
 - melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan operasional pembudidayaan ikan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dan petunjuk teknis usaha budidaya perikanan;
 - melaksanakan pengawasan terhadap peredaran benih ikan dan peredaran hasil pembudidayaan perikanan;
 - melaksanakan monitoring dan pemantauan pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan budidaya di wilayah, sungai, waduk, danau, rawa dan genangan air lainnya.
6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang dibantu oleh :
- a. Seksi pengembangan usaha dan bina mutu dengan tugas :

- Merencanakan kegiatan pengembangan usaha dan bina mutu;
 - Melaksanakan penyebaran teknologi pengolahan;
 - Melaksanakan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - Melaksanakan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan;
 - Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan usaha hasil perikanan;
 - Membuat laporan di bidang pengembangan usaha dan bina mutu.
- b. Seksi pemasaran hasil perikanan :
- Merencanakan kegiatan pemasaran hasil perikanan;
 - Menyediakan data distribusi ikan dan harga ikan;
 - Melaksanakan pembinaan pemasar produk hasil kelautan dan perikanan;
 - Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana kelompok pemasar hasil perikanan;
 - Melaksanakan evaluasi sarana dan prasarana kelompok pemasaran hasil perikanan;
 - Melaksanakan promosi dan sosialisasi dalam rangka peningkatan konsumsi ikan.
- c. Seksi pelayanan usaha perikanan :
- Merencanakan kegiatan pelayanan usaha perikanan;
 - Melaksanakan promosi dan kelembagaan;
 - Melaksanakan fasilitasi usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
 - Membimbing kelembagaan kelompok pengolah dan pemasar;
 - Mengontrol penerbitan tanda daftar usaha pengolahan ikan skala mikro dan kecil;
 - Membuat laporan data informasi statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

2.1.5 Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan (UPT)

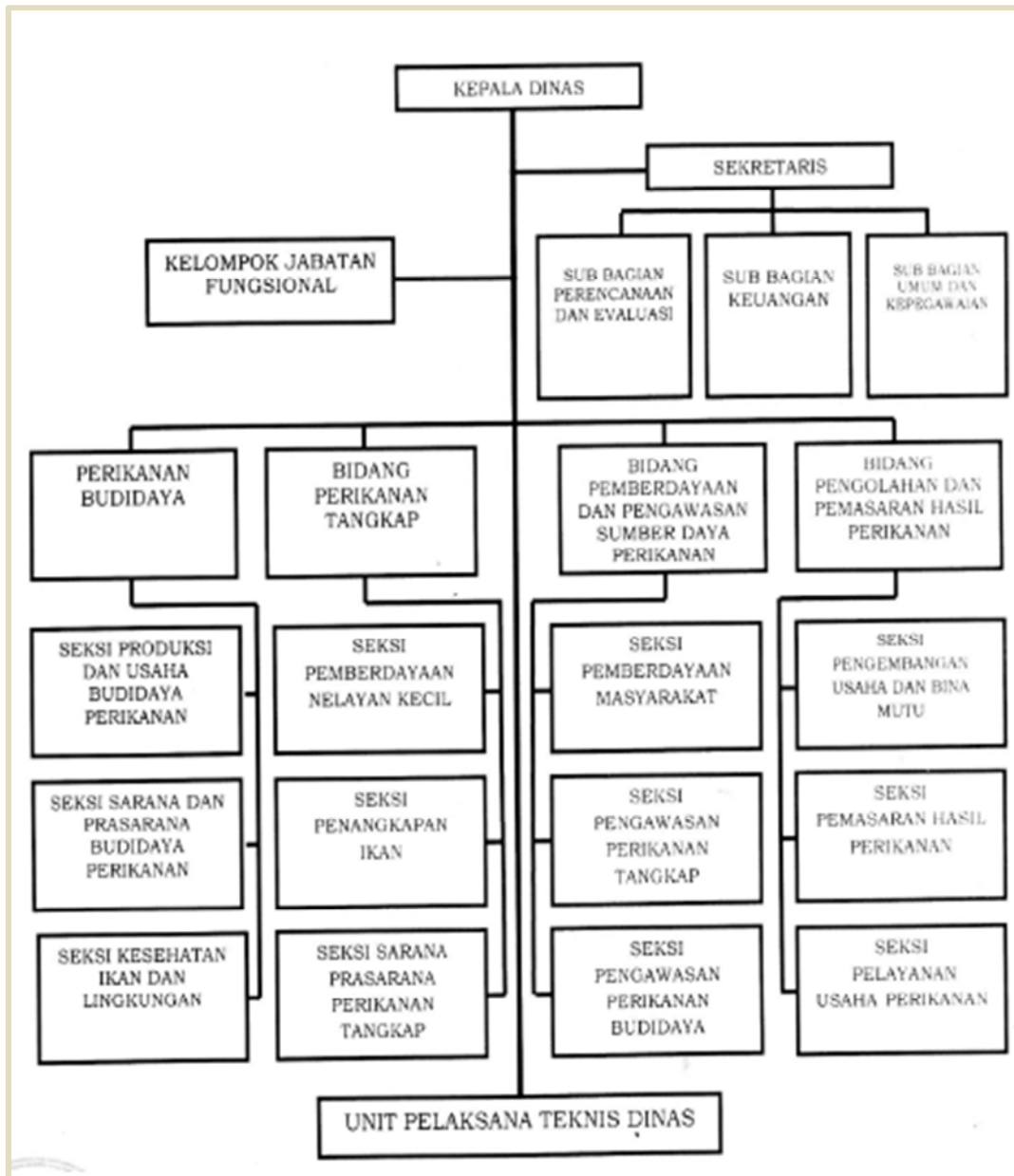
Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. UPT Dinas Perikanan dibentuk atas pertimbangan pemberian dukungan pelaksanaan sebagian kegiatan teknis tertentu pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Pada Pasal 2 Perbup No.80 Tahun 2018 disebutkan bahwa UPT Dinas Perikanan terdiri dari :

- a) UPT Tempat Pelelangan Ikan (UPT TPI) dengan klasifikasi kelas B memiliki kedudukan di bawah Dinas Perikanan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Perikanan yang dipimpin oleh seorang kepala UPT dan melaksanakan tugas teknis operasional dalam kewenangan pelelangan ikan. Adapun uraian tugas teknis dapat diuraikan sebagai berikut :

- Penyiapan bahan program, kegiatan, dan administrasi teknis pada UPT Tempat Pelelangan Ikan;
 - Pelaksanaan teknis operasional kegiatan UPT Tempat Pelelangan Ikan;
 - Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pada UPT Tempat Pelelangan Ikan;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Tempat Pelelangan Ikan;
 - Pengurusan pemungutan retribusi daerah terkait dengan pelayanan umum dan jasa; dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan.
- b) UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau dengan klasifikasi kelas B memiliki kedudukan di bawah Dinas Perikanan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan yang dipimpin oleh seorang kepala UPT dan melaksanakan tugas teknis operasional dalam kewenangan pengelolaan pembudidayaan ikan. Adapun uraian tugas teknis dapat diuraikan sebagai berikut :
- Penyiapan bahan program, kegiatan, dan administrasi teknis pada UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau;
 - Pelaksanaan teknis operasional kegiatan UPT Tempat Pelelangan Ikan;
 - Pengelolaan produksi, distribusi, dan pemasaran induk dan benih unggul ikan air tawar/air payau;
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 DATA PERSONIL

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan bidang perikanan didukung oleh sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kerja kontrak. Berdasarkan pada data kepegawaian tahun 2020 Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan memiliki dengan jumlah personil ASN sebanyak 44 orang dan personil tenaga kerja kontrak sebanyak 23

orang, dimana jenjang pendidikan serta kepangkatan masing-masing personil dinas dapat dijelaskan sebagaimana terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.1**Data Kepegawaian Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan****Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan**

No.	Pendidikan	ASN	PPPK	TKK	Jumlah
1	S2	11	-	2	13
2	S1/D4	24	-	13	37
3	D3	-	-	-	-
4	SMA/Sederajat	7	-	8	15
5	SMP/Sederajat	-	-	-	-
TOTAL		42	-	23	65

Sumber : Dinas Perikanan Kab.Lamongan 2021

Tabel II.2**Data Kepegawaian Berdasarkan Status Kepegawaian****Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan**

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	42
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-
3	Tenaga Kontrak Kerja	23
TOTAL		65

Sumber : Dinas Perikanan Kab.Lamongan 2021

Tabel II.3
Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan
Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

No.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1.	PEMBINA / IV	11
2.	PENATA / III	26
3.	PENGATUR / II	5

Sumber : Dinas Perikanan Kab.Lamongan 2021

2.2.2 ASSET, SARANA DAN PRASARANA

Selain pentingnya sumber daya manusia yang mencukupi secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan juga dukungan sarana prasarana yang tercukupi dalam menunjang kelancaran pengambilan kebijakan dalam pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Lamongan. Adapun data Asset / Modal yang dimiliki Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Data sebagai berikut :

Tabel II.4
Daftar Asset Jenis dan Jumlah Sarana Perkantoran
Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	KET.
1	2	3	4	
1	Meja Kerja	46	46	
2	Meja Tamu	5	5	
3	Meja Receptionis	1	1	
4	Meja Esselon	4	4	
5	Meja Rapat	9	9	
6	Meja Build UP	5	5	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

2021-2026

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	KET.
1	2	3	4	
7	Meja Komputer	2	2	
8	Kursi Kerja	43	43	
9	Kursi Tamu	17	17	
10	Kursi Esselon	13	13	
11	Kursi Hadap	5	5	
12	Kursi Rapat Putar	7	7	
13	Kursi Rapat	99	99	
14	Almari	19	19	
15	Buffet Kaca	8	8	
16	Almari Kayu	5	5	
17	Filling Kabinet	5	5	
18	Rak Kayu	2	2	
19	Mesin Absensi	1	1	
20	Telepon	1	1	
21	Kipas Angin	1	1	
22	Kipas Angin Besar	1	1	
23	Monitor Berdiri	1	1	
24	TV	4	4	
25	AC Split	15	15	
26	Komputer PC	7	7	
27	Notebook	28	28	
28	Printer	21	21	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

2021-2026

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	KET.
1	2	3	4	
29	Aquarium	1	1	
30	Whiteboard	3	3	
31	Mesin Tik	1	1	
32	Brand Kas	1	1	
33	Kamera Digital	2	2	
34	Kamera Attachmen	1	1	
35	LCD Proyektor	2	2	
36	Layar	1	1	
37	Sound System	3	3	
38	Handycam	1	1	
39	Hardisk	2	2	
40	Spektrafotometer	1	1	
41	Laminar Flow	1	1	
42	Deep Frezer	1	1	
43	Refrigator Showcase	1	1	
44	Autoclave	1	1	
45	Bender Waterbath	1	1	
46	Incubator	1	1	
47	Furnace	1	1	
48	Centrifuse	1	1	
49	Blender	1	1	
50	Thermometer	1	1	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

2021-2026

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	KET.
1	2	3	4	
51	Timbangan Digital			
52	Vortek			
53	Elektroforesis			
54	Geldoc UV Trans n C			
55	Power Suplay			
56	Master Cyder Personal			
57	Microscop			
58	BOD Track			
59	DO Meter			
60	Digital Soil PH Meter			
61	Refraktometer			
62	Ph. Air Pocket			

Sumber : Kartu Inventaris Dinas Perikanan Kab.Lamongan 2021

Tabel II.5

Daftar Asset Jenis dan Jumlah Sarana Gedung dan Bangunan

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI		KET
			BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	5	6
I.	Bangunan Gedung Kantor	5	5	-	Gedung Kantor Utama,UPT Lab.Kesehatan Ikan dan Lingkungan,Gedung Penyuluhan,Gedung Bangsal, dan Gedung Kios Hasil Olahan

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI		KET
			BAIK	RUSAK	
2.	Bangunan Gudang Tertutup	1	1	-	Gudang Backhoe
3.	Bangunan Gedung/Kantor BBI	2	1	1	
4.	Kantor UPP dan HNSI	2	2	-	
5.	Bangunan Gedung TP	5	5	-	
6.	Bangunan UPT Bangunan				
	• Pucuk	1	1	-	
	• Brondong	1	1	-	
	• Glagah	1	1	-	
	• Turi	1	1	-	

Sumber : Buku KIB Dinas Perikanan Kab.Lamongan 2021

Tabel II.6

Daftar Asset Jenis dan Jumlah Kendaraan Bermotor

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI		KET
			BAIK	RUSAK	
1.	Station Wagon	8	8	-	
2.	Pick Up	3	3	-	
3.	Sepeda Motor	37	37	-	
4.	Excavator	2	2	-	

Sumber : Buku KIB Dinas Perikanan Kab.Lamongan 2021

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamonga

akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Indikator kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten selama 5 (lima) tahun terakhir mengacu pada sasaran strategis seperti yang ditentukan dalam Renstra sebelumnya Tahun 2016-2021 yang dapat dapat diuraikan sebagai berikut :

- Meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan indikator prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap dari tahun baseline
- Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan indikator prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya dari tahun baseline
- Meningkatnya kesejahteraan petani (nelayan/pembudidaya ikan) dengan indikator indeks harga yang diterima oleh petani

Sedangkan ketercapaian target kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD tahun 2017-2021 dapat kami jelaskan melalui tabel matriks sebagai berikut :

TABEL II.7 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017-2020

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	SPM/Standar nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi				Rasio Antara Target dan Realisasi			
								Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Sub Lapangan Usaha Perikanan dan Kesejahteraan Petani (Nelayan/Pembudidaya)	1. Nilai Tukar Petani (Sub Sektor Perikanan)	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	% Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-	-	%	1,08 (76.976,44 ton)	2,19 (77.823,18 ton)	3,32 (78.679,24 ton)	4,45 (79.544,71 ton)	0,57 (76.589,56 ton)	2,2 (77.829,70 ton)	4,15 (79.315,10 ton)	4,81 (79.819,32 Ton)	52,78%	100,45%	125,00%	108,09%
		2. % Pertumbuhan Sub Lapangan Usaha Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	% Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-	-	%	1,04 (51.837,15 ton)	5,16 (53.951,00 ton)	10,42 (56.648,55 ton)	15,94 (59.480,97 ton)	2,08 (52.371,73 ton)	5,54 (54.146,98 ton)	10,93 (56.910,46 ton)	16,42 (59.728,00 Ton)	200,00%	107,36%	104,89%	103,01%
			Meningkatnya Kesejahteraan Petani (Pembudidaya dan Nelayan)	Indeks Harga Yang Diterima Nelayan/Pembudidaya	-	-	%	124	125	126	127	142	150,38	171,06	159,73	114,52%	120,31%	135,76%	125,77%

Dinas Perikanan selaku pelaksana tugas desentralisasi pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Lamongan memiliki indikator tingkat keberhasilan pembangunan sektor perikanan yaitu peningkatan produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya serta peningkatan nilai indeks harga yang diterima oleh pelaku usaha perikanan. Berdasarkan pada tabel 11.7 di atas, pencapaian target produksi perikanan pada tahun 2017-2020 rata-rata tercapai dengan tingkat capaian 100%, hal ini dipengaruhi oleh peran serta dinas Perikanan dalam memberikan pendampingan, pelatihan, pemberdayaan, serta bantuan sarana dan prasarana produksi kepada pelaku usaha perikanan sehingga produksi perikanan dapat mencapai target yang ditargetkan. Adapun berdasarkan tabel 11.7 terdapat juga pencapaian target yang mengalami penurunan pada dari tahun sebelumnya namun masih mencapai target yang ditentukan, target pencapaian indeks harga yang diterima pada tahun 2019 mencapai 171,06 namun di tahun 2020 indeks harga yang diterima hanya 159,73, hal ini dikarenakan adanya pandemic covid-19 yang berpengaruh terhadap serapan hasil produksi perikanan baik dalam kondisi segar maupun olahan sehingga mempengaruhi indeks harga yang diterima oleh pelaku usaha perikanan.

Realisasi anggaran pendukung tercapainya target indikator kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021 dapat dijabarkan pada tabel berikut :

**TABEL II.8 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Belanja Tidak Langsung	5.739.080.000	4.755.150.000	4.706.120.000	4.886.003.500	5.264.585.128	4.597.715.701	4.554.674.842	4.598.729.917	92%	97%	97%	93%
Belanja Langsung	6.007.276.400	6.129.076.400	6.251.216.000	3.323.214.600	5.865.770.372	5.763.078.249	5.841.615.890	3.020.413.943	98%	94%	93%	91%
Total Belanja	11.746.356.400	10.884.226.400	10.957.336.000	8.209.218.100	11.130.355.500	10.360.793.950	10.396.290.732	7.619.143.860	95%	95%	95%	93%

**TABEL II.9 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Program	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Pelayanan Administrasi Perkantoran	729.276.400	764.626.400	853.702.000	761.420.500	643.523.122	670.316.885	750.181.038	603.422.544	88%	88%	88%	79%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	275.000.000	779.150.000	382.000.000	395.935.900	274.996.450	721.772.000	379.490.000	380.381.000	100%	93%	99%	96%
Peningkatan Disiplin Aparatur	-	35.850.000	-	-	-	35.850.000	-	-	-	100%	-	-
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	18.800.000	81.500.000	88.700.000	-	18.800.000	47.475.000	74.862.500	-	100%	58%	84%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

2021-2026

Program	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000	80.000.000	130.000.000	150.000.000	59.866.000	75.560.000	129.885.000	149.800.000	99%	94%	99%	99%
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	940.000.000	614.500.000	625.000.000	289.900.000	930.246.000	550.477.864	605.777.400	266.638.000	99%	90%	97%	92%
Pengembangan Budidaya Perikanan	1.730.000.000	2.074.445.000	1.559.014.000	765.621.200	1.701.743.800	1.949.233.000	1.334.795.422	680.213.100	98%	94%	86%	89%
Pengembangan Perikanan Tangkap	390.000.000	685.000.000	815.000.000	405.721.100	387.485.000	668.633.000	807.108.000	399.481.100	99%	98%	99%	98%
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1.813.000.000	991.705.000	1.720.000.000	465.915.900	1.797.910.000	987.685.500	1.702.168.030	465.615.699	99%	99%	99%	99%
Program Pengembangan Data/Informasi Perikanan	-	-	85.000.000	-	-	-	84.736.000	-	-	-	-	99%
Total Belanja	11.746.356.400	10.884.226.400	10.957.336.000	8.209.218.100	11.130.355.500	10.360.793.950	10.396.290.732	7.619.143.860	95%	95%	95%	93%

Dinas Perikanan selaku pelaksana tugas desentralisasi pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Lamongan selain menunjukkan hasil capaian kinerja pelayanan yang positif pada tingkat capaian kinerja juga menunjukkan tingkat capaian yang positif juga dalam capaian kinerja keuangan, di mana dalam pelaksanaan kinerja pelayanan keuangan mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan tabel di atas rata-rata capaian rasio antara pagu anggaran dengan tingkat realisasi anggaran mencapai 95%. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat penyerapan anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang maksimal guna untuk membangun dan mensejahterakan pelaku usaha perikanan dan menjadikan Perikanan sebagai sektor unggulan dan penting di Kabupaten Lamongan demi mewujudkan pembangunan kejayaan lamongan yang berkeadilan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Perikanan dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Tantangan dan peluang ini merupakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS. Dari uraian pada bab sebelumnya maka dapat dilakukan identifikasi terhadap potensi tantangan dan peluang dalam pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Lamongan guna menghasilkan kebijakan dan strategi yang tepat, dengan uraian sebagai berikut :

a. Tantangan meliputi :

- 1 Penurunan kualitas lingkungan budidaya, wilayah pesisir, dan wilayah penangkapan ikan
- 2 Alih fungsi lahan potensial perikanan menjadi kawasan kegiatan non sektor perikanan
- 3 Peningkatan kualitas SDM perikanan yang belum merata dalam merespon kebutuhan SDM berkapasitas tinggi dalam industri perikanan
- 4 Keterbatasan akses pasar para pelaku usaha olahan hasil perikanan

b. Peluang meliputi :

- 1 Goodwill Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mendukung pertumbuhan investasi terutama melalui kemudahan dan inovasi sektor perizinan
- 2 Teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan yang semakin berkembang dan berorientasi kepada inovasi yang berwawasan ramah lingkungan;
- 3 Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil kelautan dan perikanan semakin tinggi dan masih luasnya pasar yang bisa diakses oleh para pelaku usaha perikanan;
- 4 Makin bertambahnya pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan



BAB III
Permasalahan dan Isu Strategis
Perangkat Daerah
RENSTRA DINAS
PERIKANAN
2021-2026

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis serta identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, Renstra PD Provinsi dan seterusnya sangat diperlukan guna menghasilkan hasil analisis dan identifikasi mengenai rumusan permasalahan dan isu strategis sehingga dapat menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tepat dan dapat terukur kinerjanya.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas desentralisasi di bidang perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang perikanan. Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan, mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar, maupun ikan olahan, serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui matriks tabel di bawah ini :

Tabel III.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor-faktor yang Mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
1	Belum Optimalnya Produksi dan Kualitas Hasil Perikanan	Masih rendahnya penggunaan benih ikan unggul	Benih Ikan atau Udang Yang Ada di HSRT Masih Banyak Yang Belum Bersertifikat (SNI)	Kurangnya Pengawasan Terhadap Mutu Benih Ikan	Belum Optimalnya Penggunaan Benih Yang Berkualitas Oleh Pembudidaya
		Lahan potensial perikanan budidaya semakin berkurang	Adanya alih fungsi lahan menjadi lahan non perikanan	Kurangnya koordinasi antar sektor bidang PD	Kebutuhan lahan untuk sektor lain semakin meningkat
		Destructive Fishing	Penggunaan alat tangkap perikanan yang belum ramah lingkungan	1. Kurangnya pengawasan kepada Nelayan Laut dan PUD 2. Kurangnya Sosialisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Belum optimalnya penyediaan alat tangkap perikanan ramah lingkungan sebagai pengganti
		Belum Optimalnya Penerapan system rantai dingin dalam penanganan hasil produksi perikanan	Rendahnya mutu kualitas produk hasil perikanan	Belum optimalnya bantuan sarana prasarana system rantai dingin	Kurangnya Pemahaman Penanganan Pasca Panen dari Pembudidaya/Nelayan

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI LAMONGAN

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang, oleh karena itu maka visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang ingin dicapai sebuah organisasi atau Instansi pemerintah dan di jelaskan pada saat sekarang impian,cita-cita atau pandangan tersebut dapat terwujud pada saat ini. Visi pembangunan perikanan merupakan koridor utama yang mengawal kesinergian dan perjalanan sektor perikanan menuju kondisi yang ingin diinginkan. Sedangkan misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinsikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini. Misi lebih terkonsentrasi

ke saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan proses-proses dalam organisasi, serta tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai visi organisasi.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan adalah :

"TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN"

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan. Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Kejayaan** Lamongan adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
2. **Berkeadilan** adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021- 2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah**
- Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman**
- Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan**
- Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram**
- Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi**

Dinas Perikanan sebagai pelaksana tugas di bidang perikanan beserta tugas dan fungsinya memiliki keterkaitan dalam Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lamongan yaitu pada misi ke-1, sebagaimana dijelaskan pada matriks tabel berikut ini :

TABEL 3.II
TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI/WAKIL BUPATI LAMONGAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

No.	Visi/Misi/Program Kerja/Bupati/Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
1	<p>Visi : “Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”</p> <p>Misi : Ke-1 “Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah”</p> <p>Tujuan : “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan”</p>	Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan bidang perikanan	Belum Optimalnya Produksi dan Kualitas Hasil Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk perikanan di Kabupaten Lamongan sebagian besar masih dijual dalam bentuk produk segar 2. Kurangnya diversifikasi produk olahan perikanan dan produk unggulan berbasis ikan khas Lamongan 3. Belum optimalnya penanganan ikan hasil pasca panen dengan metode system rantai dingin (Cold Chain System) dan belum optimalnya penerapan CBIB dan CPIB pada proses produksi budidaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor Perikanan masih menjadi sektor unggulan sebagai penyumbang komponen nilai PDRB yang tinggi 2. Kebutuhan akan produk perikanan semakin meningkat dan masih luasnya akses pemasaran produk hasil perikanan 3. Semakin Berkembangnya jumlah pelaku usaha sektor perikanan dan olahan hasil perikanan

No.	Visi/Misi/Program Kerja/Bupati/Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
	<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan <p>Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai Tukar Petani (NTP) % Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan <p>Program Prioritas Pada RPJMD :</p> <ol style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 				

No.	Visi/Misi/Program Kerja/Bupati/Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
	3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L dan RENSTRA PROVINSI

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja melainkan harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat. Telaahan terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan memiliki hubungan linieritas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur yaitu mewujudkan pembangunan sektor perikanan. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun rencana dengan tugas pokok fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DISKANLA ditinjau dari sasaran jangka menengah dan kebijakan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur :

TABEL 3.III
TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)		Permasalahan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sasaran Jangka Menengah Renstra KKP				
Sasaran Strategis :		Masih rendahnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Sebagian besar produksi perikanan di Kab.Lamongan masih dijual dalam bentuk ikan segar	Sektor Perikanan masih dipandang sebagai sektor yang menjanjikan dengan data pada tahun 2020 masih memberikan kontribusi terhadap PDRB 30%
1	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat			
Indikator :				
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat kelautan dan Perikanan (IKMKP)	1. Produksi perikanan di Kabupaten Lamongan mayoritas masih dijual dalam bentuk ikan segar 2. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Masyarakat	1. Masih rendahnya diversifikasi produk olahan hasil perikanan 2. Kurangnya kesadaran betapa pentingnya mengkonsumsi ikan, karena ikan hanya dipandang sebagai lauk selingan	Kebutuhan akan produk perikanan mengalami peningkatan
Sasaran Strategis :				
2	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat			
Indikator :				
1	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perikanan (PDB)			
2	Nilai Ekspor Hasil Perikanan			
3	Konsumsi Ikan			

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

2021-2026

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)		Permasalahan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sasaran Strategis :				
3	Sumberdaya kelautan dan Perikanan Berkelanjutan			
Indikator :				
1	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologi yang aman	Belum optimalnya penerapan aturan terhadap batasan biologis yang aman terhadap hasil tangkapan ikan	Penangkapan perikanan sudah memasuki kategori over fishing	Adanya penerapan inovasi teknologi Fish On sebagai aplikasi realtime pelaporan dan pengawasan jenis dan berat hasil tangkapan perikanan
Sasaran Strategis :				
6	Tata kelola SDKP bertanggung jawab	Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi wilayah pesisir	Pengelolaan konservasi wilayah pesisir masih dianggap hanya tanggung jawab pihak terkait	Adanya Perda Prov.Jawa Timur No.1 Tahun 2018 Tentnag RZWP3K tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil
Indikator :				
1	WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola			
2	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir			
3	% Compliance pelaku usaha kelautan dan perikanan			
Sasaran Strategis :		Belum optimalnya produksi hasil perikanan di Kabupaten Lamongan khususnya hasil produksi garam	1. Harga komoditas garam dengan nilai HET yang sangat rendah 2. Sifat budidaya di Kabupaten Lamongan yang masih tradisional	1. Adanya penggunaan dan inovasi teknologi terbaru dalam hal produksi maupun nilai tambah produksi garam 2. Daya dukung luasan potensi perikanan di Kabupaten Lamongan yang masih bisa dikembangkan
7	Industrialisasi KP Berdaya Saing			
Indikator :				
1	Produksi Perikanan			
2	Produksi Garam			
Sasaran Strategis :		Belum optimalnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Lamongan	1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengawasan 2. Keterbatasan jumlah personil dan intensitas pengawasan/patrol	Adanya kelompok-kelompok pengawas masyarakat (POKMASWAS) yang membantu kinerja pengawasan
8	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan integratif			
Indikator :				
1	% cakupan WPPNRI yang dipantau dari illegal fishing			
2	% penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan			

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

2021-2026

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)		Permasalahan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
9	Tata kelola pemerintahan yang baik			
Indikator :		Belum optimalnya penerapan 8 area perubahan dalam indeks Reformasi Birokrasi	Kurangnya pemahaman ASN Dinas Perikanan terhadap essensi Reformasi Birokrasi	Dinas Perikanan telah mendapat nilai implementasi SAKIP berdasarkan LHE Inspektorat dengan kategori sangat Baik
1	Indeks Reformasi Birokrasi KKP			
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPAO KKP			

Adapun telaah terhadap Renstra PD Provinsi dilakukan terhadap Renstra Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024:

TABEL 3.IV

TELAH RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

Renstra Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur		Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sasaran Jangka Menengah Renstra DKP Provinsi Jawa Timur :				
Sasaran Strategis :		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya Produksi dan Kualitas Hasil Perikanan 2. Masih rendahnya diversifikasi produk olahan hasil perikanan 3. Belum optimalnya evaluasi capaian kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar produksi perikanan masih dijual dalam bentuk segar 2. Belum optimalnya penerapan system evaluasi kinerja secara berjenjang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan akan produk perikanan meningkat 2. Adanya inovasi teknologi baik dari segi on farm maupun off farm 3. Etos kerja dan nilai implementasi SAKIP Dinas Perikanan telah mendapat kategori sangat baik
1	Meningkatnya Nilai Tambah Sub Kategori Perikanan			
Indikator :				
1	% Peningkatan Nilai Tambah Sub Kategori Perikanan			
Sasaran Strategis :				
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator :				
1	Nilai Evaluasi implementasi SAKIP			

3.4 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH PADA RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 disebutkan bahwa rancangan tata ruang wilayah untuk kawasan perikanan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan, Pelestarian, Rehabilitasi, dan Penetapan Kawasan Hutan Mangrove berada di lokasi Kecamatan Brondong dan Paciran
- b. Pengembangan kawasan perikanan tangkap berada di Kec.Brondong dan Paciran
- c. Pengembangan Perikanan budidaya budidaya air payau dan atau tambak berada di wilayah Kec.Pucuk,Deket,Glagah,Karangbinangun,Turi,Lamongan,Kalitengah,Karanggeneng,Paciran
- d. Pengembangan Perikanan Budidaya air Tawar berada di semua wilayah Kecamatan
- e. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Perikanan di semua wilayah Kecamatan
- f. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di semua wilayah Kecamatan
- g. Pengembangan Kawasan Minapolitan perikanan tangkap berada di Kec.Paciran dan Brondong
- h. Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya berada di Kec. Kec.Pucuk,Deket,Glagah,Karangbinangun,Turi,Lamongan,Kalitengah,Karanggeneng,Paciran
- i. Pengembangan TPI berada di Kec.Brondong dan Paciran

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan dengan menyandingkan Indikasi Program pada Lampiran 4 RTRW yang harus diampu oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dengan tugas pokok fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan. Berikut disajikan matriks hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan 2020 – 2039 :

TABEL 3.V

TELAAH RT/RW KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020-2039

INDIKASI PROGRAM	LOKASI	PENGARUH TERHADAP PELAYANAN KEBUTUHAN PD	PERMASALAHAN PELAYANAN PD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE					
Pengelolaan, Pelestarian, Rehabilitasi, dan Penetapan Kawasan Hutan Mangrove	Kecamatan Brondong dan Paciran	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan kawasan mangrove memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan, pelestarian, dan rehabilitasi tanaman mangrove yang berada di kawasan pesisir sesuai kewenangan	Belum optimalnya kegiatan pengelolaan dan rehabilitasi tanaman mangrove	1. Luasan kawasan lestari hutan mangrove semakin kecil	Telah ditetapkan luasan kawasan ekosistem mangrove seluas 84 HA di wilayah Kecamatan Paciran dan Brondong dalam Dokumen RT/RW
KAWASAN PERIKANAN					
Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap	Kec.Paciran dan Brondong	1. Dinas Perikanan Kab.Lamongan berdasarkan indikasi program dalam dokumen RT/RW memiliki peranan pelayanan sebagai leading sektor dalam pengembangan kawasan perikanan tangkap maupun budidaya sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 2. Sesuai dengan	Belum Optimalnya Produksi dan Kualitas Hasil Perikanan	Perencanaan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Lamongan belum berpedoman secara optimal berdasarkan kaidah dokumen RT/RW	1. Adanya Peraturan Daerah Terbaru dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan sebagai pedoman pembangunan sektor
Pengembangan Perikanan budidaya budidaya air payau dan atau tambak	Kec.Pucuk,Deket,Glagah,Karangbinangun,Turi,Lamongan ,Kalitengah,Karanggeneng,Paciran				
Pengembangan Perikanan Budidaya air tawar	Seluruh Kecamatan				
Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan	Seluruh Kecamatan				

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

2021-2026

INDIKASI PROGRAM	LOKASI	PENGARUH TERHADAP PELAYANAN KEBUTUHAN PD	PERMASALAHAN PELAYANAN PD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Seluruh Kecamatan	pembagian kewenangan pengelolaan perikanan sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dinas Perikanan untuk Tempat Pelelangan hanya memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan			perikanan 2. Pengelolaan TPI masih dapat dioptimalkan 3. Sektor Perikanan masih berkembang hal ini dibuktikan dengan permintaan kebutuhan produk perikanan yang semakin meningkat
Pengembangan kawasan minapolitan tangkap	Kec.Paciran dan Brondong				
Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya	Kec.Pucuk,Deket,Glagah,Karangbinangun,Turi,Lamongan ,Kalitengah,Karanggeneng,Paciran				
Pengembangan TPI	Kec.Brondong dan Paciran				

3.5 TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD

Pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Lamongan juga turut memperhatikan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH). SDA-LH sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA-LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan masa yang akan datang. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan

keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia, berikut akan disajikan matriks hasil telaahan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan :

TABEL 3.VI**TELAHAH KLHS PADA RENSTRA DINAS PERIKANAN**

Permasalahan/Isu Strategis dalam KLHS	Pengaruh Terhadap Pelayanan Kebutuhan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
DINAS PERIKANAN				
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Dinas Perikanan selaku leading sektor pelaksana urusan perikanan memiliki peran dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan dan meningkatkan kesejahteraan petani	Belum Optimalnya Produksi Perikanan dan Kualitas Hasil Perikanan	Dokumen KLHS belum dijadikan pedoman dalam pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Lamongan secara optimal	Kebijakan dan strategi yang diambil dalam pembangunan sektor perikanan lebih memperhatikan kajian keberlanjutan sumberdaya perikanan

3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Instrument analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat

Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh isu strategis dalam pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Lamongan yaitu :

1. Adanya perubahan kebijakan terkait berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya kewenangan dalam pengelolaan wilayah laut oleh Pemerintah Daerah
2. Kegiatan produksi perikanan budidaya diharapkan pada tantangan keamanan pangan, kesehatan lingkungan, sosial ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan
3. Alat bantu penangkapan ikan perlu adanya regenerasi
4. Perlu adanya restocking di Perairan Umum Daratan (PUD)
5. Perlu adanya upaya peningkatan standar produk olahan hasil perikanan dan penanganan pasca panen
6. Masih maraknya illegal fishing dan over fishing di wilayah laut dan perairan umum daratan



BAB IV
Tujuan dan Sasaran
RENSTRA DINAS
PERIKANAN
2021-2026

BAB IV**TUJUAN DAN SASARAN****4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD**

Dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi 1 **“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sektor unggulan daerah”**.

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan terkait dengan pencapaian misi pertama dari RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu **“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui optimalisasi potensi sektor unggulan daerah”**. Maka perlu ditetapkan mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, dimana yang dimaksud dengan Tujuan adalah untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Oleh Karena itu maka Dinas Perikanan selaku pelaksana tugas desentralisasi dan pengambil kebijakan dalam pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Lamongan selama 5 tahun menetapkan 2 tujuan dengan 4 sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. **Meningkatkan Produksi Perikanan dan**
2. **Mneingkatkan Kesejahteraan Pelaku Perikanan**

Dengan sasaran yang ingin dicapai sebanyak 4 yaitu :

1. **Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap;**
2. **Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya;**
3. **Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan;**
4. **Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.**

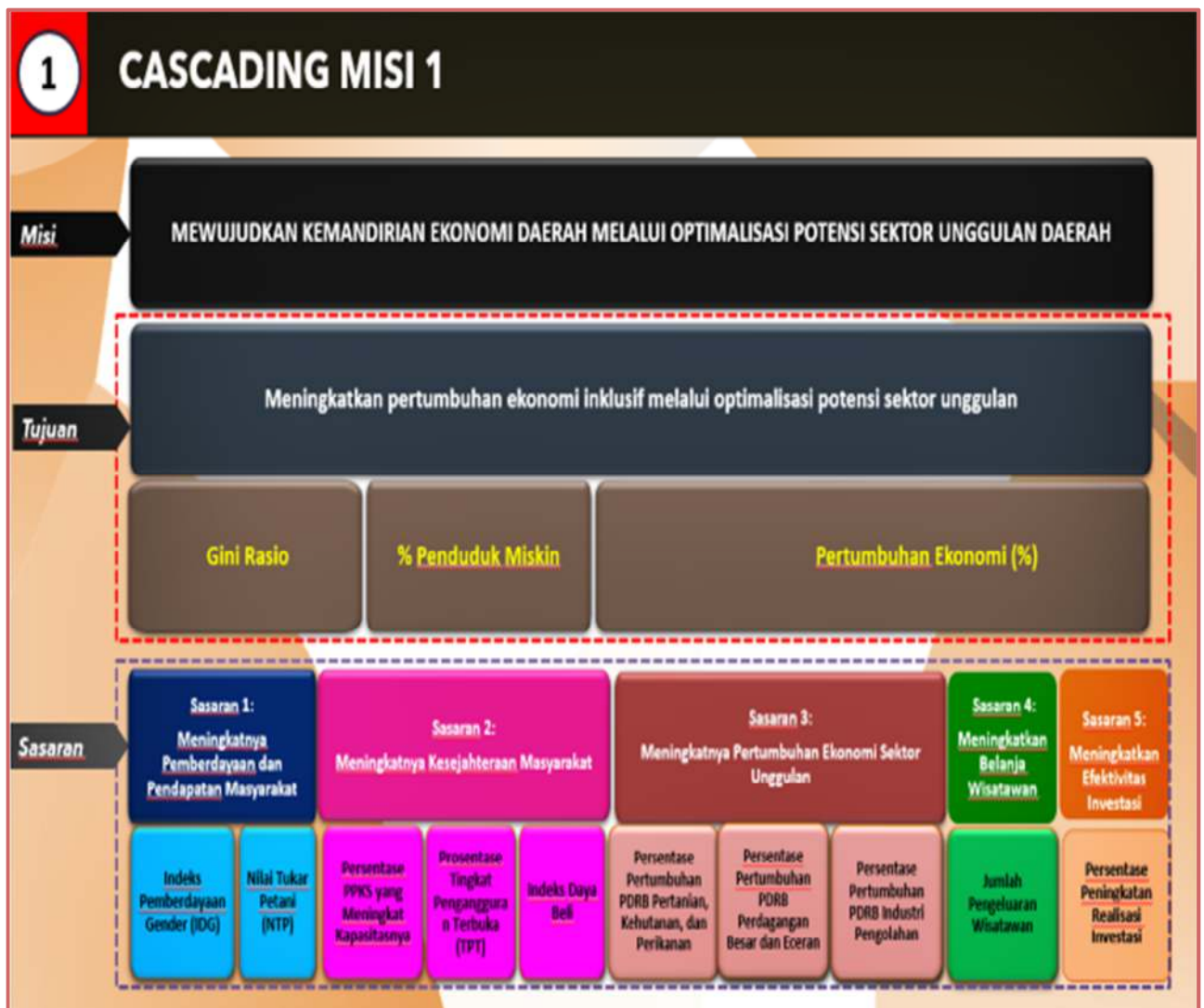
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

2021-2026

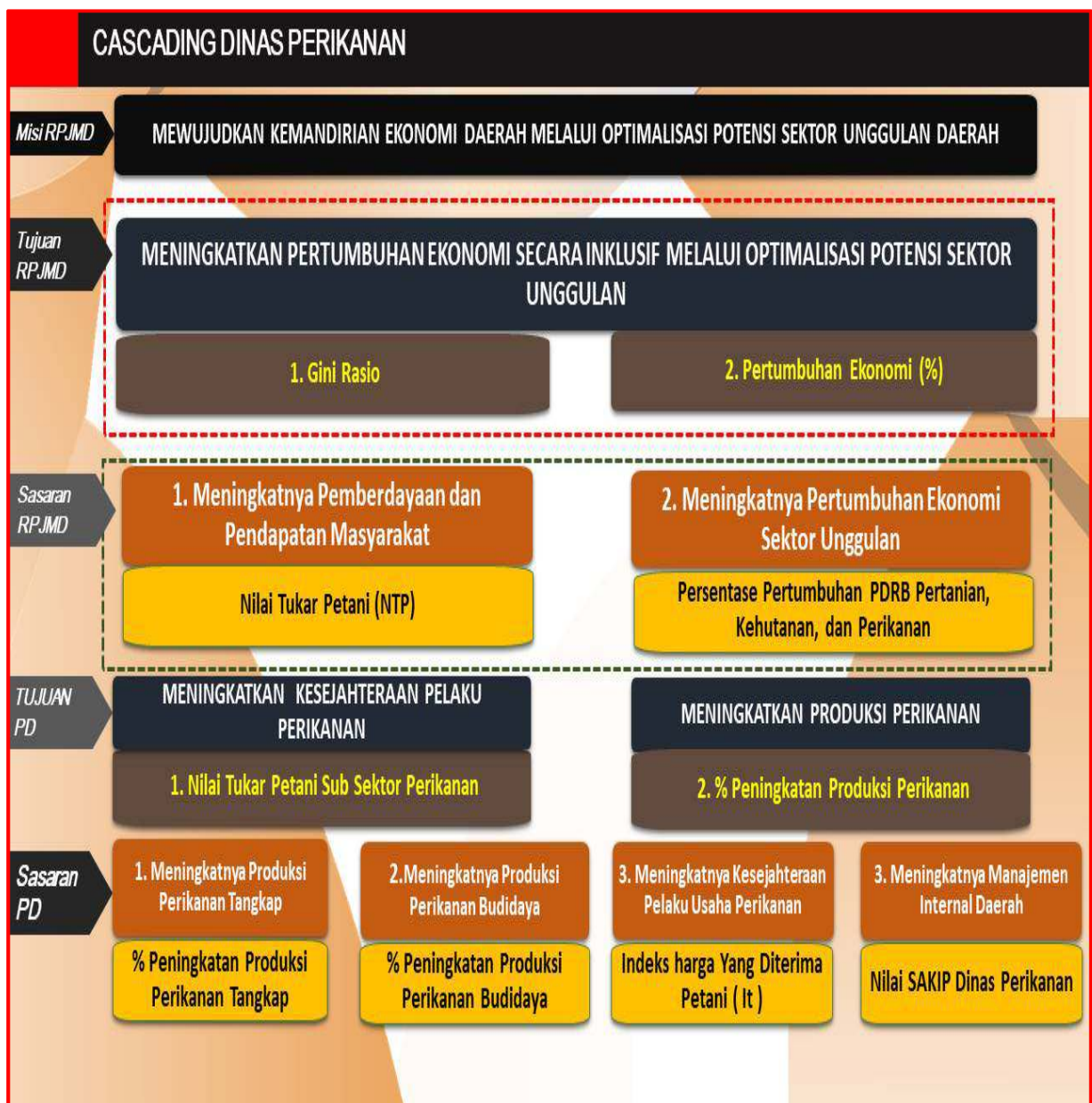
Berdasarkan tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah tercantum di atas, maka selanjutnya akan dijelaskan melalui matriks tabel dan cascading kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 mengenai indikator tujuan, sasaran, serta target yang ingin dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja DPD dan keberhasilan pembangunan sektor perikanan sebagaimana berikut di bawah ini :

Gambar 4.1 Cascading Misi I pada RPJMD Tahun 2021-2026



Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 akan lebih mudah dipahami melalui gambar/model cascading sebagaimana terdapat pada gambar 4.II dan 4.III berikut :

**Gambar 4.II Cascading Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan
Tahun 2021-2026**



Gambar 4.II Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan Pada Renstra Dinas Perikanan

Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026



Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan (DISKANLA) yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

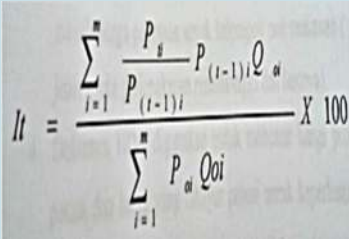
TABEL IV.I TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline (2020)	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan	139.547,48 Ton	3,34%	4,19%	4,93%	5,56%	6,08%	6,08%
2	Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Perikanan	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan	119,14	119,15	119,16	119,17	119,18	119,19	119,19
No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline (2020)	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
				1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	79.819,32 Ton	1,26%	1,76%	2,27%	2,78%	3,30%	3,30%
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	59.728,16 Ton	6,13%	7,44%	8,49%	9,27%	9,79%	9,79%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Indeks Harga Yang Diterima Petani (it)	159,73	159,80	159,82	159,84	159,86	159,88	159,88
4	Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90,24	90,25	90,26	90,27	90,28	90,29	90,29

TABEL 4.II PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER DATA, DAN TARGET

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan Baik Tangkap Maupun Budidaya Yang Dihasilkan Selama 1 Tahun	Jumlah Produksi Perikanan Tahun Sekarang - Jumlah Produksi Perikanan Tahun Baseline Dibagi Jumlah Produksi Perikanan Tahun Baseline Dikalikan 100	139.547,48 Ton	148.028,18 Ton
2	Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Perikanan	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan	Nilai Tukar Antara Barang/Produk Petani Sub Sektor Perikanan dengan Barang-Barang Konsumsi dan Faktor Produksi yang Dibutuhkan Petani Sub Sektor Perikanan yang Dinyatakan Dalam Persen	$NTP = It : Ib \times 100$ It : Indeks Harga Yang Diterima Ib : Indeks Harga Yang Dibayar	119,14	119,19

TABEL 4.II PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER DATA, DAN TARGET

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	% Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Baik Perikanan Tangkap Laut dan Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) Yang Dihasilkan Selama 1 Tahun	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sekarang - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Baseline Dibagi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Baseline x 100	Data Produksi Perikanan Tangkap	79.819,32 Ton	3,30%
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	% Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Baik Perikanan Tangkap Laut dan Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) Yang Dihasilkan 1 Tahun	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sekarang - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Baseline Dibagi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Baseline x 100	Data Produksi Perikanan Budidaya	59.728,16 Ton	9,79%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Indeks Harga Yang Diterima Petani (it)	Indeks Harga Komoditas yang Dihasilkan Petani yang Mencerminkan Hasil Penjualan dari Seluruh Jenis Barang Hasil Produksinya	 $It = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{P_t}{P_{(t-1)i}} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^n P_{ti} Q_{oi}} \times 100$	Data Rilis BPS Kabupaten Lamongan	159,73	159,88

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
4	Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian dari Inspektorat	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	LHE Inspektorat	90,24	90,29

A photograph of a busy fish market. In the foreground, several large woven baskets are filled with fresh fish, including what appear to be sea bream and other species. People, mostly women wearing traditional conical hats and light-colored clothing, are seen handling the fish. Some are sitting on the ground, while others are standing. The background shows more people and the structure of the market, with a slightly hazy atmosphere. The overall scene depicts a traditional and active fishing community.

BAB V
Strategi dan Arah Kebijakan
RENSTRA DINAS
PERIKANAN
2021-2026

BAB V**STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**

Strategi merupakan cara-cara yang ditempuh dengan memilih program-program prioritas sesuai visi misi Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja capaian dalam 5 tahun.

Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merealisasikan misi pertama (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan **untuk “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah”**. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara-cara dan kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis secara efektif dan efisien.

Perencanaan strategis mengagendakan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat dan daya saing melalui upaya peningkatan kinerja birokrasi dan manajemen publik. Strategi pembangunan daerah akan diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan disusun secara komprehensif agar dapat mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Oleh karena itu, melalui arah kebijakan dan strategi dapat dijelaskan secara sistematis dan tetap menjadi rujukan dalam setiap jalannya kegiatan pemerintahan selama 5 tahun. Perumusan strategi didasarkan pada kriteria:

- 1) Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- 3) Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

Strategi merupakan rangkaian tahapan yang berisi grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan. Rumusan strategi serta

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

2021-2026

arah dan kebijakan yang diambil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan guna mewujudkan pembangunan sektor perikanan selama 5 tahun kedepan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan				
MISI I : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah				
SASARAN : 1. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat				
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Produksi Perikanan dan Kesejahteraan Pelaku Perikanan	1 Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	1 Pengoptimalan penangkapan ikan di laut dan perairan umum secara berkelanjutan dan bertanggungjawab melalui penyediaan serta penyebarluasan teknologi tepat guna penangkapan ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap 2. Peningkatan kegiatan restocking sumberdaya perikanan khususnya perikanan umum daratan 3. Peningkatan kualitas manajemen kelompok dan peningkatan kelas kelompok perikanan tangkap (KUB) 4. Optimalisasi pengawasan potensi perikanan tangkap melalui pembinaan dan patroli keliling
		2 Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	2 Pengembangan infrastruktur perikanan budidaya serta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemenuhan penyediaan sarana dan prasarna perikanan budidaya

VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan				
MISI I : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah				
SASARAN : 1. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat 2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			penerapan metode CBIB dan CPIB dalam peningkatan kualitas budidaya perikanan melalui pembinaan dan pendampingan kepada pelaku perikanan budidaya	2. Peningkatan jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pemberdayaan (Pelatihan, Fasilitas) 3. Optimalisasi peran dan fungsi Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dalam penanggulangan Hama Penyakit Ikan (HPI) 4. Optimalisasi pengawasan potensi perikanan budidaya
2	Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Perikanan	3 Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	3 Meningkatkan Nilai Tambah Hasil Pelaku Usaha Perikanan melalui diversifikasi produk olahan hasil perikanan	1. Meningkatkan Kuantitas Produksi serta Kualitas Hasil Pelaku Usaha Perikanan melalui bantuan sarana prasarana olahan perikanan, dan distribusi hasil perikanan 2. Peningkatan jumlah pelaku usaha perikanan mikro dan kecil yang mendapatkan fasilitasi akses pelatihan dan pemasaran hasil produk olahan perikanan

VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan			
MISI I : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah			
SASARAN : 1. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat 2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	4 Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	1 Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas ASN Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Pelatihan Peningkatan Kualitas ASN Dinas Perikanan	1. Meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran 2. Mengusulkan Pendidikan dan Pelatihan Secara Berkala Khususnya Evaluasi Kinerja

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

2021-2026

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPJMD dan menyesuaikan horison waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut:

TABEL 5.II

TIME HORIZON ARAH KEBIJAKAN RPJMD

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

No.	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	PENGUATAN DAYA SAING SDM PENUNJANG SOSIAL EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN YANG INKLUSIF	1. Peningkatan penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap	-	✓	✓	-	-
2	AKTIVASI EKOSISTEM PEREKONOMIAN UNTUK MENJAGA KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	2. Peningkatan kegiatan restocking sumberdaya perikanan khususnya perikanan umum daratan	-	✓	✓	-	-
		3. Peningkatan kualitas manajemen kelompok dan peningkatan kelas kelompok perikanan tangkap (KUB)	-	✓	✓	-	-
		4. Peningkatan pemenuhan penyediaan sarana dan prasarna perikanan budidaya	-	✓	✓	-	-
		5. Peningkatan jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pemberdayaan (Pelatihan, Fasilitasi)	-	✓	✓	-	-
		6. Optimalisasi peran dan fungsi Laboratorium	-	✓	✓	-	-

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

2021-2026

No.	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
			2022	2023	2024	2025	2026
		Kesehatan Ikan dan Lingkungan dalam penanggulangan Hama Penyakit Ikan (HPI)					
		7. Meningkatkan Kuantitas Produksi serta Kualitas Hasil Pelaku Usaha Perikanan melalui bantuan sarana prasarana olahan perikanan, dan distribusi hasil perikanan	-	✓	✓	-	-
		8. Peningkatan jumlah pelaku usaha perikanan mikro dan kecil yang mendapatkan fasilitasi akses pelatihan dan pemasaran hasil produk olahan perikanan	-	✓	✓	-	-



BAB VI
Rencana Program dan Kegiatan Serta
Pendanaan
RENSTRA DINAS
PERIKANAN
2021-2026

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional, rencana program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel berikut:

TABEL VI.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	Meningkatkan Produksi Perikanan dan Kesejahteraan Pelaku Perikanan	-	-	-	- Meningkatkan Produksi Perikanan	139.547,48 Ton	3,34%	13.773.932.600	4,19%	13.252.176.033	4,93%	13.412.792.406	5,56%	13.580.049.929	6,08%	13.754.281.968	6,08%	13.754.281.968	DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN BIDANG PERIKANAN TANGKAP		
		-	-	-	- Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan	119,14	119,15	119,16	119,17	119,18	119,19	119,19									
	1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	-	-	-	- Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	79.819,32 Ton	1,26%	1.095.000.000	1,76%	1.053.521.400	2,27%	1.066.290.079	2,78%	1.079.586.717	3,30%	1.093.437.814	3,30%			1.093.437.814
	32053	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	-	-	-	- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	79.819,32 Ton	80.821,81 Ton	1.095.000.000	81.225,92 Ton	1.053.521.400	81.632,05 Ton	1.066.290.079	82.040,21 Ton	1.079.586.717	82450,41 Ton	1.093.437.814	82450,41 Ton			1.093.437.814
		320531	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu)	-	-	-	- Cakupan Wilayah Potensi Perikanan Tangkap Yang Dikelola	35,29%	52,94%	750.000.000	157,14%	763.521.400	76,47%	753.000.000,00	88,24%	750.000.000	100,00%	750.000.000	100,00%	750.000.000	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

2016-2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
			Daerah Kabupaten / Kota																
		3 2 0 2.0 5 3 2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten /Kota	- Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Kelompok Yang Mendapatkan Bantuan Pemda)	6 KUB	20 KUB 100.000.000	21 KUB 90.000.000	22 KUB 100.521.400	23 KUB 96.104.578	24 KUB 100.000.000	24 KUB 100.000.000								
		3 2 0 2.0 5 3 3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	- % Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Yang Memiliki Standar Operasional	10%	10% 245.000.000	10% 200.000.000	10% 212.768.679	10% 233.482.139	10% 243.437.814	10% 243.437.814								
		3 2 0 2.0 5 3 3 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	- Jumlah TPI Aktif	5	5	5	5	5	5	5								
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budi	-	-	- Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	59.228,16 Ton	4,59% 4.050.000.000	7,44% 3.896.586.000	8,49% 3.943.812.622	9,27% 3.992.991.966	9,79% 4.044.222.053	9,79% 4.044.222.053							BIDANG PERIKANAN BUDI DAYA	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

2016-2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
2	daya	3 2 0 5 4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	59.728,16 Ton	63.391,84 Ton	4.050.000.000	64.172,53 Ton	3.896.586.000	64.797,08 Ton	3.943.812.622	65.265,49 Ton	3.992.991.966	65.577,77 Ton	4.044.222.053	65.577,77 Ton	4.044.222.053		
		3 2 0 2.0 5 4 2	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	- Jumlah Pembudidaya Ikan Yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	280 Pembudidaya Ikan	300 Pembudidaya Ikan	400.000.000	310 Pembudidaya Ikan	420.000.000	320 Pembudidaya Ikan	450.000.000	330 Pembudidaya Ikan	460.000.000	340 Pembudidaya Ikan	480.000.000	340 Pembudidaya Ikan	480.000.000		
		3 2 0 2.0 5 4 4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	- Cakupan Wilayah Potensi Budidaya Yang Dikelola (Jumlah Wil.Potensi Perikanan Budidaya Yang Dikelola dalam 1 Tahun dibagi Jumlah Wil.Potensi Budidaya Yang Ada dikalikan 100	26%	33,33%	3.650.000.000	37,04%	3.476.586.000	40,74%	3.493.812.622,00	44,44%	3.532.991.966	48,15%	3.564.222.053	48,15%	3.564.222.053		
	3	Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Perikanan	-	-	-	Indeks Harga Yang Diterima Petani (Pembudidaya dan Nelayan)	159,73	160,00	1.402.500.000	160,50	1.349.373.300,00	161,00	1.365.727.704,00	161,50	1.382.758.329,00	162,00	1.400.499.118,00	162,00	1.400.499.118

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

2016-2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
	Usaha Perikanan	3 2 0 5 5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	- Cakupan Wilayah Potensi Perikanan Yang Dilakukan Pengawasan	0	26,67%	500.000.000	40,00%	481.060.000	53,33%	486.890.447	66,67%	492.961.971	80%	499.286.673	80%	499.286.673	PERIKANAN DAN BIDANG PENGOLOMONGAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
		3 2 0 2.0 5 5 1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kab/kota	- Jumlah Wilayah Yang Dilakukan Pengawasan	0 Kecamatan	4 Kecamatan	500.000.000	6 Kecamatan	481.060.000	8 Kecamatan	486.890.447	10 Kecamatan	492.961.971	12 Kecamatan	499.286.673	12 Kecamatan	499.286.673		
		3 2 0 5 6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Jumlah Ikan Yang Diolah	89.179,36 Ton	90.916,16 Ton	902.500.000	91.825,32 Ton	868.313.300	92.743,57 Ton	878.837.257	93.671,01 Ton	889.796.358	94.607,72 Ton	901.212.445	94.607,72 Ton	901.212.445		
		3 2 0 2.0 5 6 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	- Jumlah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Yang Sudah Berstandarisasi (Berizin)	48 UPI	10 UPI	402.500.000	10 UPI	422.562.500	10 UPI	433.165.342	10 UPI	440.000.000	10 UPI	450.000.000	98 UPI	450.000.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

2016-2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		3 2 0 2.0 5 6 3	Penyediaan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	- Jumlah Ikan Yang Dipasarkan (Ton)	139.547,48 Ton	142.874,73 Ton	500.000.000	145.398,45 Ton	445.750.800	146.429,13 Ton	445.671.915	147.305,7 Ton	449.796.358	148.028,18 Ton	451.212.445	148.028,18 Ton	451.212.445		
2	Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah	-	-	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90,24	90,25	7.226.432.600	90,26	6.952.695.333	90,27	7.036.962.001	90,28	7.124.712.917	90,29	7.216.122.983	90,29	7.226.122.983		
	1 Meningkatkan kepuasan aparatur internal perangkat daerah terhadap penyelenggaraan manajemen internal perangkat daerah	-	-	- Persentase kepuasan aparatur internal perangkat daerah	79%	81%		82%		83%		84%		85%		85%			
		3 2 0 5 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Nilai IKM Dinas Perikanan	83,05	85,25	7.226.432.600	85,87	6.952.695.333	86,4	7.036.962.001	87,5	7.124.712.917	88,31	7.216.122.983	88,31	7.226.122.983		
		3 2 0 2.0 5 1 1	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	17 Dokumen	17 Dokumen	100.000.000	17 Dokumen	110.000.000	17 Dokumen	120.000.000	17 Dokumen	130.000.000	17 Dokumen	140.000.000	17 Dokumen	150.000.000		
		3 2 0 2.0 5 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	14 Laporan	14 Laporan	5.727.447.600	14 Laporan	5.468.631.333	14 Laporan	5.542.898.001	14 Laporan	5.620.648.917	14 Laporan	5.702.058.983	14 Laporan	5.702.058.983		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

2016-2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		3 2 0 2.0 5 1 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Prosentase pegawai dengan nilai SKP baik	100%	100%	22.500.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000		
		3 2 0 2.0 5 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	6 Pelayanaan	6 Pelayanaan	170.410.300	6 Pelayanaan	120.000.000	6 Pelayanaan	120.000.000	6 Pelayanaan	120.000.000	6 Pelayanaan	120.000.000	6 Pelayanaan	120.000.000		
		3 2 0 2.0 5 1 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- % Barang Milik Daerah Yang Tersedia (Jmlh.Barang Milik Daerah Yang Disediakan dibagi Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dibutuhkan)x100	0	100%	51.510.700	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000		
		3 2 0 2.0 5 1 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3 Pelayanaan	3 Pelayanaan	754.064.000	3 Pelayanaan	754.064.000	3 Pelayanaan	754.064.000	3 Pelayanaan	754.064.000	3 Pelayanaan	754.064.000	3 Pelayanaan	754.064.000		
		3 2 0 2.0 5 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase barang milik daerah yang dipelihara	0	80%	400.500.000	81%	400.000.000	82%	400.000.000	83%	400.000.000	84%	400.000.000	85%	400.000.000		



BAB VII
Kinerja Penyelenggaraan Bidang
Urusan
RENSTRA DINAS
PERIKANAN
2021-2026

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja pelayanan bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan periode masa jabatan yaitu Tahun 2021-2026. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Perikanan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan,

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan berkontribusi untuk mewujudkan Visi dan Misi sesuai dengan kewenangan sebagaimana terdapat pada tabel 7.1 berikut :

TABEL 7.1**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan	139.547,48 Ton	3,34%	4,19%	4,93%	5,56%	6,08%	6,08%
2	Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Perikanan	119,14	119,15	119,16	119,17	119,18	119,19	119,19
3	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	79.819,32 Ton	1,26%	1,76%	2,27%	2,78%	3,30%	3,30%
4	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	59.728,16 Ton	6,13%	7,44%	8,49%	9,27%	9,79%	9,79%
5	Indeks Harga Yang Diterima Petani (it)	159,73	159,80	159,82	159,84	159,86	159,88	159,88
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90,24	90,25	90,26	90,27	90,28	90,29	90,29

A group of people, including men and women, are engaged in planting mangrove saplings in a field. They are wearing blue caps and white shirts. The field is filled with rows of young mangrove trees. The background shows a large open area with some structures and trees in the distance.

BAB VIII
Penutup
RENSTRA DINAS
PERIKANAN
2021-2026

BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan strategis (Renstra) pembangunan Perikanan dan Kelautan adalah merupakan bentuk rencana program peningkatan kinerja yang disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan untuk jangka waktu 2021 - 2026 mendatang. Dengan pertimbangan potensi yang ada, sarana dan prasarana yang tersedia serta kemampuan untuk mencapai sasaran menjadi pendorong dalam meningkatkan perikanan dan kelautan sesuai program yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Startegis (Renstra) PD Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja PD) dinas, acuan dan tolak ukur kinerja dinas, pelaksanaan rencana strategis ini sangat memerlukan partisipasi dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Diharapkan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sektor Perikanan di Lamongan guna mewujudkan :

“ Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan ”